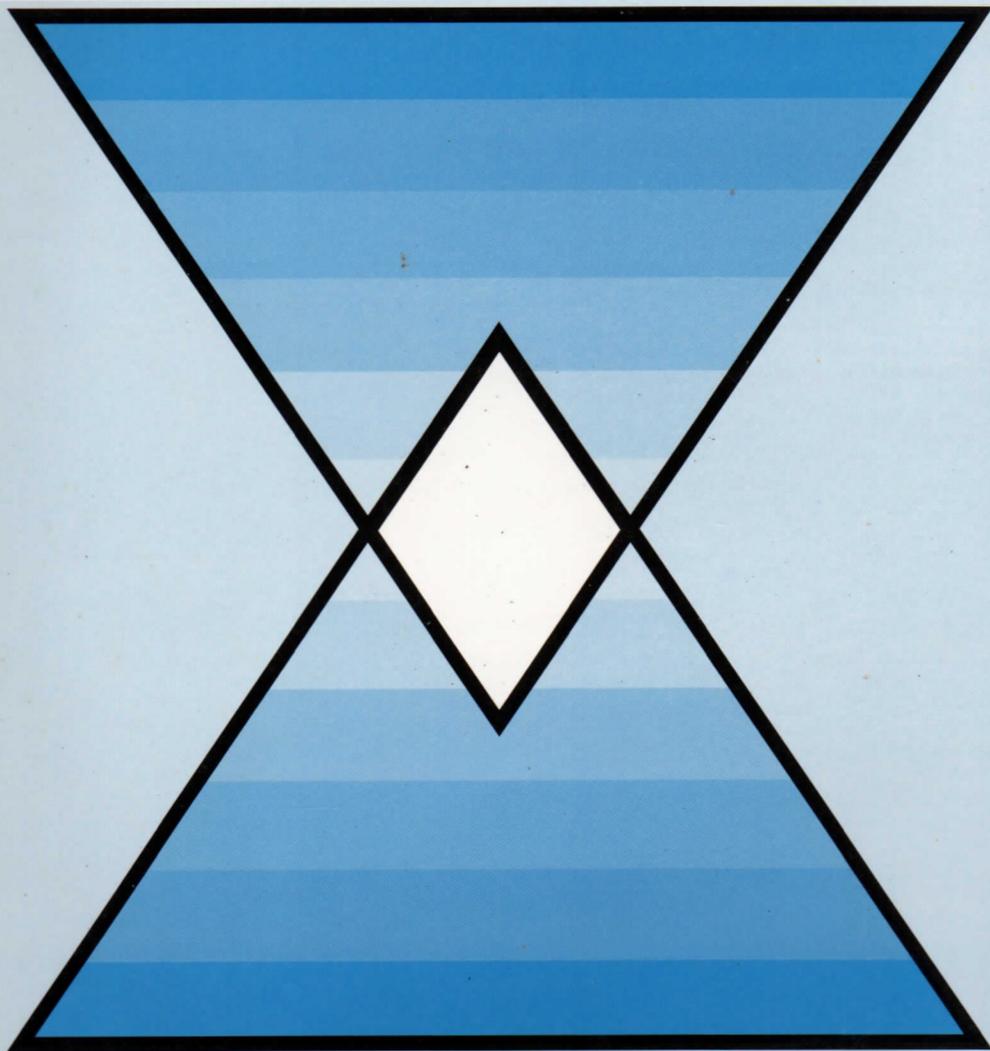


JURNAL ILMU SOSIAL ALTERNATIF

Volume VIII, No. 1, Mei 2007

ISSN: 1411-3821



Diterbitkan oleh:
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"

JURNAL ILMU SOSIAL ALTERNATIF

Terbit dua kali setahun pada bulan Mei dan Desember. Berisi artikel ilmiah hasil pemikiran dan hasil penelitian di bidang Pembangunan Masyarakat Desa, Ilmu Sosiatri, Ilmu Pemerintahan, dan Ilmu Komunikasi.

Ketua Penyunting
Sutoro Eko Yunanto

Penyunting Pelaksana
E.W. Tri Nugroho
Rini Dorojati
Muslim Tendry

Mitra Bestari
Sunyoto Usman (Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)
Mudiyono (Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)
Wuradji (Universitas Negeri Yogyakarta)
FX. Mukarto (Universitas Sanata Dharma Yogyakarta)
Pratikno (Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)
Isbandiyah (Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)
Triyanto Purnomo Raharjo (STPMD "APMD" Yogyakarta)
Leslie Retno Angeningsih (STPMD "APMD" Yogyakarta)

Pelaksana Tata Usaha
Kusno Sudoyo

Alamat Penyunting dan Tata Usaha: Redaksi Jurnal Ilmu Sosial Alternatif, STPMD "APMD", Jl. Timoho No. 317, Telpn 561971, Yogyakarta 55225.

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD", sejak Mei 2000, menerbitkan terbitan berkala ilmiah "Ganesha": Wacana Pembangunan Masyarakat. Untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman dan Instrumen Evaluasi untuk Akreditasi Berkala Ilmiah yang dikeluarkan oleh Ditbinlitabmas, Ditjen Dikti, Depdikbud Tahun 2001, STPMD "APMD" sejak Mei tahun 2003, mengubah Ganesha tersebut menjadi **JURNAL ILMU SOSIAL ALTERNATIF**

Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Naskah diketik atas kertas HVS kuarto spasi ganda sepanjang lebih kurang 20 halaman, dengan format seperti tercantum pada halaman kulit dalam-belakang ("Persyaratan Naskah untuk JISA"). Naskah yang masuk dievaluasi dan disunting untuk keseragaman format, istilah, dan tata cara lainnya.

Dicetak di Percetakan "Aditya Media". Isi di luar tanggungjawab percetakan

Masalah Lingkungan Hidup dan Kependudukan Perdesaan
di Kawasan Segara Anakan
Hastowiyono 1-18

Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Menanggulangi Bencana
Banjir dan Tanah Longsor
Tri Nugroho 19-34

Perencanaan Desa sebagai Alternatif Atas Keterbatasan
Perencanaan Daerah
Sutoro Eko 35-50

Detail Engineering Design (Ded) Bidang Kepegawaian dalam
Alih Status Desa Menjadi Kelurahan di Kabupaten Kulon-Progo
Suharyanto 51-66

Strategi Menumbuhkembangkan Organisasi Sosial di Perdesaan
Sugiyanto 67-78

Desa dan Jaring-Jaring Kemiskinan
Supardal 79-94

Marginalisasi Desa dalam Pembangunan
Krisdyatmiko 95-110

STRATEGI MENUMBUHKEMBANGKAN ORGANISASI SOSIAL DI PERDESAAN

Sugiyanto¹

ABSTRACS

The problems in rural social organization are very complex. One of the most crucial is how to develop the social organizations themselves. There are two factors that affect their development: internal and external. The internal factors include human resource, organization management, job specification and distribution as well as financial management. The external factors cover external support, limited networking, and the effects of globalization.

More specifically, the problems within the rural social organizations have the roots in four constraints: (a) lack of facilities, (b) lack of professional resources, (c) the limited number of the community members participating in the social organization, and (d) limited networking.

To overcome the problems and to foster the development of social organizations, it is imperative that a strategy be adopted to reduce the tension between the financial management on the one hand and the rural social organizations, which are non-profit in nature, set up by groups of altruist people.

Kata-kata kunci: Organisasi sosial, tumbuh-kembang, perdesaan.

PENDAHULUAN

Pada hakekatnya keberadaan organisasi sosial di perdesaan membantu pemerintah perdesaan sekaligus mitra dalam memberdayakan masyarakat perdesaan guna meminimalisir masalah-masalah yang dihadapi oleh warga dan pemerintah desa setempat. Untuk itu usaha organisasi sosial desa pada dasarnya dapat dikristalkan menjadi usaha perdesaan.

Menurut Harton, Paul & Chesterl Hunt (Sugiyanto, 2002:48) terjadinya organisasi sosial di perdesaan

adalah akibat dari pengaruh hubungan sosial diantara anggota kelompok dan kesadaran jenis. Jadi setiap anggota organisasi sosial sadar atas keberadaan dirinya dibutuhkan oleh anggota lain, maka mereka rela melakukan aktivitas apapun dan mereka saling percaya atas manfaat dari aktivitas tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat memberikan *trust* dan kerelaan di perdesaan menurut Sugiyanto (2002 : 40) antara lain: 1) mereka mau dan sadar; 2) mereka senang dengan aktivitas tersebut; 3)

¹ Sugiyanto adalah dosen dari Program Studi Ilmu Sosiatri STPMD "APMD" Yogyakarta

mereka memerlukan dalam hidupnya untuk membagi tugas, peran, fungsi dan tanggungjawab; 4) mereka merasa diuntungkan secara non ekonomi

Adapun ditinjau dari fungsi dan jenis masalahnya, organisasi sosial diperdesaan terdiri atas: 1) organisasi sosial tradisional di masyarakat seperti arisan, simpanpinjam, sinoman (perkumpulan pemuda), tahlil, majelis taklim, remaja masjid, remaja gereja, memulih, paguyuban dan patembayan; 2) organisasi sosial minat seperti kelompok belajar, kelompok usaha, kelompok tani wanita (KTW); 3) organisasi sosial yang bertujuan mengatasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), seperti kelompok penanganan penyandang cacat mental dan cacat ganda, kelompok yang menangani para jompo terlantar, kelompok yang memfokuskan diri pada fakirmiskin dan anak terlantar.

Selain tidak komersial, organisasi sosial perdesaan juga memiliki beberapa kecenderungan antara lain: 1) bersifat lokal, yang ditandai dengan pengelola atau pengurus terdiri dari tokoh lokal. Tokoh ini bertindak menggerakkan dan mendayagunakan organisasi sosial yang didalamnya terdiri tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh budaya dan tokoh pemuda 2) Keberadaannya berasal dari perkumpulan-perkumpulan non formal yang tumbuh dan berkembang ditingkat lokal bersifat alamiah dan tradisional. Beberapa contoh seperti kelompok swadaya

masyarakat, lumbung desa, kelompok kandang/kelompok ternak, kelompok kesenian tradisional, kelompok arisan, kelompok pengajian, kelompok sinoman dan paguyuban perkumpulan non ekonomi; 3) Tataran komunitas atas pembentukan *top down* (perintah dari atas/pemerintah) termasuk didalamnya supra desa sebagai contoh PKK, Pos Yandu, RT, RW, Dewan Perwakilan Desa, dan Dasa Wisma.

Mengingat beragamnya organisasi sosial di perdesaan yang secara nyata bermanfaat bagi anggotanya dan lahir atas tuntutan kebutuhan mereka, dalam kenyataannya organisasi sosial tersebut belum memberi fungsi maksimal. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengungkap lebih jauh bagaimana strategi menumbuhkembangkan organisasi sosial di perdesaan, agar organisasi sosial tersebut mampu menjadi ajang peningkatan kesejahteraan bagi anggota secara optimal

PROBLEM ORGANISASI SOSIAL DI PERDESAAN

Menumbuhkembangkan organisasi sosial menurut petunjuk teknis Dirjen Bina Bantuan Sosial dan Bina Organisasi Sosial Departemen Sosial RI tahun 1994 bahwa proses kegiatan yang dilakukan secara sistematis, seimbang, terarah dan terpadu untuk meningkatkan profesionalisme organisasi sosial dalam menangani usaha kesejahteraan sosial. Konsep ini sangat idialis, tetapi kenyataannya pelaksanaan dilapangan tidak demikian

karena banyaknya kendala atau hambatan yang muncul di perdesaan, sedangkan kendala di perdesaan satu dengan perdesaan yang lain sangat bervariasi. Hal ini seperti dinyatakan oleh Rahardjo (1999 :160) bahwa lembaga sosial di perdesaan bukan merupakan fenomena yang statis, namun lembaga berubah seiring dengan perubahan fungsinya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat tertentu. Adanya berbagai variasi tersebut secara simplikasi penulis memformulasikan bahwa problem atau kendala yang dihadapi organisasi sosial di perdesaan secara umum adalah sebagai berikut:

Faktor Internal

Pertama, Keterbatasan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas. Desa umumnya memiliki sumberdaya manusia dalam kuantitas cukup, tetapi secara kualitas perlu dipertanyakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi sumberdaya manusia perdesaan kurang berkualitas antara lain: 1) latar belakang para orang tua tidak semuanya sebagai manusia terdidik pada level menengah, bahkan pada level pendidikan dasar saja belum merata.; 2) tingkat ekonomi keluarga yang sebagian besar mengandalkan sektor pertanian, dan sektor ini cenderung digarap secara tradisional, sehingga dampak dari model penggarapan lahan pertanian yang tradisional berimbas pada penghasilan yang belum optimal.; 3) tingkat terpenuhi

kecukupan gizi bagi masyarakat desa belum merata, hal ini berpengaruh terhadap ketahanan tubuh dan stamina.; 4) faktor budaya, terdapat kecenderungan generasi muda masyarakat desa pergi merantau keluar desa menuju kota, sehingga penduduk di perdesaan rata-rata berusia lanjut dan anak-remaja usia sekolah.

Kedua, manajemen organisasi. Organisasi sosial adalah suatu perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial. Kecenderungan organisasi sosial di perdesaan hampir 80% adalah tidak berbadan hukum. Faktor yang berpengaruh terhadap kondisi ini adalah manajemen organisasi. Tradisi rerata masyarakat desa lebih percaya kepada seseorang yang dianggap mampu atau tokoh. Tokoh yang dipercaya dan mampu di perdesaan sangat terbatas karena keterbatasan kuantitas dan ditunjang aktivitas yang beragam kecenderungan manajemen yang dilakukan adalah manajemen tradisional. Prinsip kerja manajemen tradisional antara lain: bekerja berdasarkan kebiasaan bukan berdasarkan perencanaan dan kebutuhan, bekerja dengan sistem sra-butan dan kroyokan sehingga kurang efisien. Bekerja bersifat isidental dan rapat-rapat atau diskusi cenderung dilakukan secara non formal. Dampak dari manajemen tradisional adalah ad-

ministrasi organisasi kurang diperhatikan, sehingga pengarsipan dan dokumentasi rata-rata *semrawut*, dan secara umum di perdesaan langka tenaga sukarela yang bekerja secara profesional.

Ketiga, keterbatasan sumber dana. Organisasi sosial di perdesaan adalah organisasi sosial yang cakupan sasaran dan fungsinya merupakan usaha kesejahteraan sosial bagi masyarakat setempat. Dalam rangka menjalankan fungsi dan mencapai tujuan organisasi sosial di perdesaan pada umumnya terkendala oleh dana. Sebenarnya di desa memiliki sumber-sumber dana yang cukup, tetapi para pengelola organisasi sosial di desa lemah terhadap cara-cara memobilisasi dan menggali sumber-sumber pendanaan. Sebagai contoh dan dapat ditiru adalah masyarakat asal Gunung Kidul DIY yang bekerja di luar daerah seperti Jakarta mereka mempunyai kekuatan emosional dan psikologis untuk membangun desanya. Mereka membuat paguyuban dan menghimpun dana dari mereka sendiri, yang setiap tahunnya disumbangkan untuk membangun Gunungkidul. Namun demikian, di perdesaan tidak semua masyarakat yang mampu bersedia berpartisipasi terhadap organisasi sosial di desanya.

Keempat, sistem kerja dan cara kerja internal. Sesuai dengan ikatan hukum yang ada sistem kerja dan cara kerja para pengelola organisasi sosial di perdesaan kecenderungan bekerja

secara tradisional dan non formal. Sebab ikatan yang diberikan adalah ikatan non formal, sehingga ada fenomena bekerja jika akan dipergunakan atau mendekati hari H. Hal ini terjadi karena faktor sukarela, dengan prinsip pengabdian, dan jarang diberi sanksi oleh anggotanya. Kondisi tersebut berdampak pada pelayanan dan hasil kerja yang tidak tepat waktu, tidak efisien dan tidak efektif. Disisi lain organisasi sosial di perdesaan keterbatasan akan sarana prasarana.

Faktor Eksternal

Faktor-faktor dari luar yang turut andil dalam melemahkan perkembangan organisasi sosial di pedesaan antara lain :

Pertama, pengaruh masukan dari luar. Pengaruh masukan ke desa dan campur tangan terhadap keberadaan organisasi sosial tidak semuanya bertabiat positif. Artinya ada sesuatu dibalik aktivitas masukan dari luar terhadap organisasi sosial tersebut. Salah satu contoh adalah donor lokal memberikan bantuan berupa materi dan bimbingan teknis keorganisasian, tetapi setelah program selesai anggota dan pengurus organisasi sosial desa dimohon memberikan dukungan dalam pemilihan. Rata-rata masukan dari luar organisasi beresiko terhadap misi tertentu, seperti misi agama, misi politik dan misi sponsor yang berdampak terhadap penjualan produk tertentu.

Kedua, Jaringan yang terbatas. Organisasi sosial di pedesaan pada

umumnya lemah terhadap jaringan. Lemahnya pemilikan jaringan disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut : 1) faktor budaya, keyakinan terhadap budaya dan tradisi masyarakat desa yang kuat menghambat masuknya informasi ke desa. Apabila ada informasi berkaitan dengan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat desa, masyarakat pada umumnya tidak dengan mudah menerima tetapi memakai proses yang panjang. Panjangnya waktu ini berakibat terhadap keterlambatan penerimaan perubahan dan pemahaman terhadap informasi dan teknologi; 2) keterbatasan fasilitas publik, perbedaan fasilitas publik di desa dan kota sangat tajam, di kota kesadaran masyarakat berlanjutan koran lebih banyak dibanding dengan masyarakat desa, demikian halnya koran umum di kota lebih banyak dibanding di desa. Pemilikan atas media lain secara kuantitas di kota cenderung kuat dibanding dengan masyarakat desa, dampak dari kesempatan dan pemilikan media berpeluang untuk mengakses informasi secara cepat dan informasi ini segera disikapi oleh masyarakat. Keterbatasan sarana untuk mengolah informasi di kota memiliki peluang yang bervariasi sedang fasilitas untuk mengolah peluang informasi di desa sangat minimalis.

Ketiga, Kebijakan pemerintah yang berubah dan dinamis. Pemerintah sebagai penyelenggara negara berupaya untuk beradaptasi terhadap

berbagai kebijakan dunia, dan perubahan dunia selalu disikapi pemerintah. Sikap pemerintah dalam mengambil kebijakan akan berimbang terhadap kebijakan pemerintahan daerah sampai pada level pemerintah desa. Dari pemerintah desa ini secara otomatis organisasi di level desa akan berdampak terhadap kehidupan masyarakatnya. Contoh pada era Orde Baru lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berkembang di desa sangat dibatasi oleh pemerintah, artinya tidak mudah pemerintah memberikan lisensi terhadap LSM berkiprah di desa. Tetapi kebijakan era reformasi dengan lahirnya UU Nomor 22 tahun 1999 dan UU Nomor 32 tahun 2002, LSM yang berkiprah di desa pada bidang politik, ekonomi, pendidikan, hukum, dan lainnya jumlahnya cukup banyak. Kebijakan lain tentang pendirian organisasi dengan munculnya UU tentang yayasan mau tidak mau organisasi sosial di desa merasakan dampak yang sangat berat dan bervariasi

Keempat, globalisasi. Dewasa ini globalisasi bukan hal yang baru bagi publik maupun masyarakat desa, sebab dalam situasi perjalanan sejarah Indonesia dari jaman pra sejarah sampai era reformasi telah membuktikan adanya tahapan-tahapan aktivitas yang dilakukan dari jaman kolonial menunjukkan adanya upaya-upaya penguasaan dunia dari bentuk penjajahan fisik, penjajahan pasar dan penjajahan moral. Pada saat ini waktunya

kesatuan dunia membumi dalam semua aspek kehidupan dapat dijelaskan dalam waktu singkat dengan teknologi internet, dan globalisasi secara langsung memaksa manusia untuk beradaptasi. Globalisasi menjadi tantangan berat bagi pemerintah Indonesia karena belum semua masyarakat Indonesia siap menerima kehadiran global tersebut terutama masyarakat yang tinggal di kawasan pedesaan. Masyarakat yang tinggal di kawasan kota saja belum semuanya siap mengakses hal ini keterbatasan pengetahuan dan fasilitas yang tidak merata, apalagi masyarakat desa untuk mengakses informasi global diperlukan prasyarat internet. Internet dapat diakses jika telah memiliki alat komunikasi telephone, di kota telah disediakan warung-warung telephone dan warung internet lalu di desa bagaimana? Telephone saja belum merata apalagi warung internet. Disisi lain konsumen di desa terhadap telephone dan internet sangat terbatas, hal ini berpengaruh terhadap investor yang berminat terhadap penyediaan fasilitas publik berupa internet untuk kawasan masyarakat desa. Kondisi ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap keberadaan organisasi sosial di pedesaan.

Faktor antara

Faktor antara yaitu faktor yang tidak termasuk dalam golongan intern dan eksternal. Faktor ini meliputi pen-

duduk pendatang, teknologi dan kebencanaan.

TUJUAN DAN SASARAN MENUMBUHKEMBANGKAN ORGANISASI SOSIAL PERDESAAN

Organisasi sosial dan masyarakat dapat dianalogikan seperti uang logam, sisi kanan dan kiri tidak akan bermakna jika harus dibelah menjadi dua bagian. Uang logam akan bermakna dan bernilai jika dalam kondisi utuh, demikian halnya organisasi sosial dengan masyarakat. Pengkajian organisasi sosial secara umum baik di desa maupun di kota sangat penting, karena pengkajian organisasi sosial diharapkan mampu menjadi media tumbuhkembangnya organisasi sosial. Tujuan menumbuhkembangkan organisasi sosial antara lain a) Meningkatkan kesadaran, tanggungjawab, kesetiakawanan sosial serta terciptanya iklim yang mampu mendorong kegairahan dan kesediaan masyarakat untuk ikut memecahkan masalah sosial di lingkungan masyarakatnya. b) Mendorong masyarakat untuk menumbuhkan lembaga yang memwadahi peran serta dalam usaha kesejahteraan sosial c) Mengembangkan lembaga organisasi sosial yang melakukan kegiatan usaha kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat d) Meningkatkan produktivitas dan kualitas kegiatan organisasi sosial melalui

pengembangan sumberdaya manusia dan sumberdaya organisasi sosial.

Sasaran menumbuhkembangkan organisasi sosial di perdesaan difokuskan pada dua hal yaitu manusia dan organisasi. *Pertama* manusia, sasaran ini difokuskan pada *stakeholder* terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh budaya, tokoh pemuda, pekerja sosial masyarakat (PSM), pengurus organisasi sosial, para penyandang masalah sosial, dan anggota masyarakat pada umumnya. *Kedua* organisasi, yaitu difokuskan pada desa yang belum memiliki atau belum ada organisasi sosialnya dan desa yang sudah memiliki organisasi sosial. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran menumbuhkembangkan organisasi sosial di perdesaan maka wujud kongkrit aktivitas ini difokuskan pada kajian menumbuhkembangkan 1) pengetahuan, 2) kemampuan, 3), sikap, 4) rasa kesetiakawanan sosial; 5) demokratisasi, 6) kemandirian, 7) partisipasi sosial.

Penumbuhkembangan organisasi sosial adalah proses kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terarah dan terpadu untuk meningkatkan profesionalisme organisasi sosial dalam menangani usaha kesejahteraan sosial. Proses ini dilakukan melalui dua tahap yaitu penumbuhan dan pengembangan. Penumbuhan adalah suatu proses untuk mendorong dan mengarahkan melembaganya usaha

kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dari, oleh dan untuk mereka sendiri. Penumbuhan organisasi sosial dimaksudkan untuk mendorong masyarakat agar melembaga peransertanya dalam pembangunan melalui usaha-usaha yang sistematis, terarah, terpadu yang berkesinambungan dalam wadah organisasi sosial sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat. Ada tiga fokus yang ditumbuhkan yaitu kelompok-kelompok tradisional, kelompok minat dan kelompok penyandang masalah sosial. Dalam penumbuhan ini dapat diprakarsai oleh tokoh masyarakat setempat.

Adapun pengembangan adalah suatu proses kegiatan untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas kegiatan usaha kesejahteraan sosial, ada tiga fokus pengembangan organisasi sosial yaitu pengembangan organisasi, pengembangan manajemen, pengembangan sumberdaya dan pengembangan program. Perbedaan antara penumbuhan dan pengembangan adalah pengembangan cenderung pada peningkatan mutu dan diversifikasi usaha yang bertujuan untuk kesejahteraan, sedang penumbuhkembangkan cenderung pada pengadaan organisasi bagi desa yang belum ada organisasi sosialnya atau memperkokoh dari embrio yang berskala kecil dikembangkan pada arah yang lebih besar dan lebih kuat.

STRATEGI MENUMBUHKEMBANGKAN ORGANISASI SOSIAL PERDESAAN

Sesuai dengan tujuan dan sasaran menumbuhkembangkan organisasi sosial dibutuhkan strategi-strategi khusus. Strategi dimaksudkan untuk penguatan dan pengembangan, sehingga strategi menumbuhkembangkan organisasi sosial di perdesaan lebih diarahkan pada pengembangan pola jaringan kerja yang dapat menguatkan kedudukan organisasi sosial tersebut. Pola pengembangan jaringan diwacanakan penulis bagaimana membangun hubungan kerjasama antar keperangatan organisasi sosial. Pola ini diharapkan terjadi sinergi sumberdaya dan sistem sumber yang pada awalnya belum terakumulasi (tersebar) diberbagai keperangatan organisasi sosial sehingga dapat mengkristal untuk membangun iklim yang kondusif bagi terwujudnya pembangunan masyarakat yang dilandasi oleh kepercayaan diri dan keswadayaan, secara sosial, budaya, ekonomi dan politik. Menurut Etty Ratisah (2005:25), Strategi menumbuhkembangkan merupakan strategi penguatan organisasi sosial diperdesaan dapat dilakukan dari berbagai aspek antara lain:

Strategi Penguatan Kelembagaan Organisasi

Menurut Etty Ratisah (2005:25), strategi menumbuhkembangkan ke-

lembagaan organisasi meliputi: a) Keperangatan pelayanan sosial, di akar rumput yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional, maupun lembaga yang sengaja dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat di perdesaan. b) Sistem kerjasama antar keperangatan pelayanan sosial, dalam hal ini pelayanan sosial dijadikan kunci dalam membangun organisasi sosial, contoh organisasi simpan-pinjam harus mengutamakan anggota dari pada pengurus dalam hal pinjam memimjam. c) Sistem sumber kesejahteraan sosial, baik yang tersedia di dalam satuan komunitas lokal atau yang berada di luar satuan komunitas lokal.

Untuk menunjang dari strategi tersebut maka perlu melakukan berbagai pendekatan kepada konsumen (anggota organisasi sosial) dalam bentuk: a) memotivasi pengembangan rasa kepedulian kerjasama antar anggota dan pengurus, b) memotivasi lahirnya prakarsa dari anggota organisasi sosial guna meningkatkan peran aktifnya, c) memberikan dukungan sosial terhadap anggota organisasi sosial, dukungan diorientasikan pada manfaat yang maksimal dari program yang telah disepakati dan dijalankan bersama.

Strategi Penguatan Dana Organisasi Sosial

Strategi penguatan dana organisasi dilakukan dengan model penggalangan dana atau *fund raising*. Penggalangan dana bukanlah pengemis

sebab penggalang dana merupakan aktivitas menyajikan kesempatan kepada orang-orang yang mampu untuk mendukung sesuatu kegiatan yang berharga dan mulia. Dengan kegiatan ini penyumbang merasa senang karena telah berbuat sesuatu yang baik untuk orang lain yang membutuhkan bantuan. Kata kunci penggalangan dana adalah "*orang merasa bahagia telah membantu sesama.*" Oleh sebab itu organisasi sosial yang melakukan penggalangan dana harus memiliki *track record* yang dapat membuktikan bahwa manajemen telah dilakukan dengan baik dan dana disalurkan sesuai dengan tujuan dan harapan para penyumbang dan bergerak sesuai koridor organisasi sosial tersebut.

Strategi penggalangan dana menurut Bernardine (2004:139) antara lain: a) meningkatkan pelayanan yang berkualitas, b) penciptaan dukungan masyarakat dan kelompok-kelompok, c) pelaksanaan kegiatan penghasil dana, d) mengadakan event pengadaan dana, e) membangun aset organisasi, dan f) pengadaan dana dari sumber domestik. Pada sumber yang sama dijelaskan lebih lanjut prinsip-prinsip pengalangan dana meliputi : a) pengalangan dana dilakukan dengan cara yang etis, b) penggalangan dana harus melindungi lingkungan yang rentan c) hormat dan respek terhadap kelompok pemberi dana. d) kredibilitas dana penanganan yang profesional

Organisasi sosial di perdesaan sebenarnya dapat melakukan penggalangan dana secara internal kepada warga desa dan secara eksternal dapat dilakukan ke pihak luar baik luar dalam arti desa, kecamatan, kabupaten atau lebih luas ke tingkat nasional atau regional. Hasil penelitian Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial propinsi DIY tahun 2004 bahwa strategi organisasi sosial yang menghadapi permasalahan dana dapat dilakukan dengan cara :a) menghemat pengeluaran, b), menggali dana dari kantong pengurus dan anggota, c) mengefektifkan program kerja, d) menyusun skala prioritas, e) menggali dana melalui *income generating* yang ada, dan f) menggali dana dari orang-orang atau organisasi di luar organisasi sosial tersebut. Oleh karena itu agar sasaran yang dibidik sebagai sumber dana tidak salah, harus pandai memilih sasaran. Cara memilih calon sumberdana disesuaikan dengan agenda, kepentingan dan karakter organisasi sosial itu sendiri. Contoh organisasi sosial dibidang pengembang pertanian maka pengurus bisa mengajukan proposal kepada pabrik pupuk atau user dari hasil pertanian tersebut.

Strategi Mediasi

Salah satu problem sosial di perdesaan adalah tidak menyatunya kehidupan warga masyarakat antara penduduk pendatang dengan penduduk

pribumi. Sejak akhir tahun delapan-puluhan kawasan perdesaan telah dibangun berbagai perumahan untuk tempat tinggal. Pertanyaannya siapa pemilik perumahan itu? Jawaban atas pertanyaan itu adalah penduduk kota yang berniat tinggal keseharian di kawasan perdesaan. Dengan bervariasinya alasan maka telah terbangun kerjasama antara pemerintah kabupaten dengan pihak kontraktor dan developer untuk melakukan pembangunan perumahan di kawasan perdesaan. Fakta yang sebenarnya bahwa penghuni perumahan itu sebenarnya sebagian juga orang yang berasal dari desa, tetapi karena developer membangun perumahan dengan alasan keamanan maka model perumahan hampir seluruhnya di pagar tembok yang tinggi dan hanya ada satu pintu untuk keluar dan masuk. Pintu tersebut dijaga oleh satpam selama 24 jam, seolah-olah penduduk lokal tidak boleh masuk kawasan perumahan. Akibat dari *setting developer* maka komunikasi antar penduduk lokal dengan pendatang tersumbat.

Salah satu dampak sosial yang negatif adalah pembangunan perumahan di kawasan perdesaan, rata-rata tidak membangun makam untuk warga perumahan yang meninggal dunia. Anehnya jika ada warga perumahan yang meninggal dunia penghuni perumahan minta ijin dapat menguburkan warganya di pemakaman bagi penduduk lokal. Tentu saja

penduduk lokal merasa keberatan dan terjadilah pertengkaran.

Berdasarkan wacana di atas maka perlu ada mediasi agar terjadi saling menguntungkan untuk penduduk lokal dan penduduk pendatang (penghuni perumahan). Media yang diharapkan adalah media yang mampu menampung aspirasi penduduk lokal dan pendatang. Media yang paling tepat adalah membuat organisasi sosial yang mewadahi keterlibatan warga lokal dan pendatang dalam berbagai event desa di tingkat lokal.

Idealnya menjadi Organisasi sosial berbasis masyarakat yang mandiri, dengan frekuensi pertemuan yang teratur, dan lebih baik jika embrio organisasi sosial tersebut merupakan kumpulan atau kelompok masyarakat lokal yang dikembangkan oleh pendatang. Menurut Krisdiatmoko (2002 : 63-64) tujuan yang diharapkan dari organisasi sosial yang mampu menjadi media penduduk lokal dengan pendatang adalah : a) meningkatkan ikatan sosial secara lebih intens dengan kebersamaan dengan membangun aturan main bersama, b) organisasi sosial menjadi wadah untuk mengidentifikasi kepentingan dan kebutuhan riil mereka secara bersama, c) sama-sama memahami cara pengambilan keputusan bersama untuk menerima konsekuensi hasil keputusan, d) masyarakat akan mengalami pembelajaran dalam resolusi konflik dan berani memperjuangkan haknya,

dan pada akhirnya akan sama-sama merasakan manfaatnya. Contoh disalah satu dusun, di desa Caturtunggal Depok Sleman, kehidupan warga pendatang dengan penduduk lokal sangat harmonis. Media bertemunya antara kedua penduduk ini adalah organisasi sosial dengan nama "Paguyuban Seloso Kliwon." Pertemuan diadakan setiap 35 hari sekali, pengurus diatur seimbang komposisinya antara pendatang dan penduduk lokal. Organisasi ini dijadikan arena warga untuk membahas kebutuhan warga baik lokal maupun pendatang, dan agenda selalu diluar acara formal seperti RT, LPMD, PKK, atau organisasi lainnya.

Strategi Pendampingan

Untuk mendukung ketiga strategi di atas, organisasi sosial di perdesaan memerlukan pendampingan. Siapa yang harus mendampingi? Jawabnya adalah tokoh masyarakat itu sendiri. Di desa pada umumnya memiliki sumberdaya manusia yang mampu menjadi *suh*, pengayom dan pengikat warga, mereka dihormati bukan karena pendidikan, bukan karena kekayaan dan jabatan namun karena kharisma dimungkinkan pejabat pemerintah tingkat desa menjadi pendamping. Dalam mengembangkan strategi pendampingan, pendamping atau orang yang dituakan setidaknya diarahkan pada pemahaman dan pengembangan yang meliputi ranah prakarsa, keunikan, swadaya, keterpaduan, dan keberlanjutan. Harapan akhir dari

pendamping adalah mampu melakukan lontaran gagasan, menciptakan iklim organisasi sosial yang sehat, mengarahkan penyusunan laporan untuk diinformasikan kepada anggota, aparat desa dan pihak lain yang terkait seperti pemberi dana, mengembangkan jaringan dan mengukur kemajuan, serta mendampingi konsultasi pengurus organisasi sosial kepada penyandang dana.

PENUTUP

Organisasi sosial di perdesaan pada dasarnya merupakan organisasi sosial nirlaba, jadi organisasi ini merupakan lembaga yang melaksanakan pelayanan sosial dan pengembangan sosial, dibentuk oleh sekelompok orang berdasarkan nilai-nilai sosial yang hidup didalam masyarakat, serta didukung oleh altruisme dalam kehidupan manusia, yaitu niat untuk keluar dari kepentingannya sendiri yang selanjutnya saling peduli dan setiakawan terhadap kepentingan orang lain.

Keberhasilan menumbuhkembangkan organisasi sosial diperdesaan dibutuhkan dukungan formal dan non formal dari aparat desa dan pendamping sebagai pelaku injektor. Kedua aktor ini sangat berperan terhadap keberhasilan sebab keduanya memiliki peran yang berbeda tetapi dalam tujuan yang sama. Aparat desa berperan sebagai pelindung dan legitimasi sedang pendamping berperan sebagai injektor dan mediator terhadap pihak-pihak terkait

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Sosial RI, 1994, *Petunjuk Teknis "Penumbuhkembangan ORSOS Tingkat Kelurahan/Desa"*, Jakarta: Dirjen Bina Bantuan Sosial.
- Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, 2001, *Pedoman Umum dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Masyarakat*, Jakarta: Dirjen Bina Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta
- Krisdiatmoko, 2002, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Institusi Lokal*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Rahardjo, 1999, *Pengantar Sosiologi Perdesaan dan Pertanian*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ratisah, Ety 2005, Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Tingkat Lokal, Bandung: Panorama Sosial, BBPPKS.
- Sugiyanto, 2002, *Lembaga Sosial*, Yogyakarta Global Pustaka Utama.
- Sugiyanto, 2004, *Organisasi Non Pemerintah dan Pemberdayaan*, Modul Matakuliah, Yogyakarta: Program Studi Ilmu Sosiatri, STPMD "APMD" ..
- Sujarwa, 1999, *Manusia dan Fenomena Budaya Menuju Perspektif Moralitas Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Wirjana, Bernadine, R, 2004, *Mencapai Kemandirian dalam Pendanaan Organisasi*, Yogyakarta: Andi Offset.